



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimili 021-3864607
Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989925, Faksimili 021-7974488
www.kemendes.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR: 537/HMS.00/III/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka penetapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023;

- MENINGAT :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan daftar Informasi Publik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal Maret 2023 Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
2. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ditetapkan di Jakarta Pada
tanggal 16 Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Dra. Erlin Chaerlinatun M.
NIP. 19670724 198701 2 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT / SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN / RETENSI ARSIP
					Hard Copy	Rekam	Soft Copy	
1	Informasi terkait koresponden Sapa Desa	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusdatin, BPIDDTT	Bulanan, Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
2	Peraturan tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusdatin, BPIDDTT	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
3	Informasi yang tercantum dalam Portal Satu Data Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusdatin, BPIDDTT	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
4	Nota Kesepahaman Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
5	Prosedur tentang pengaduan WBS	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
6	Peraturan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
7	Prosedur tentang layanan C&C (Conselling & Consultation)	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
8	Prosedur tentang Pengaduan Pungutan Liar	Inspektorat Jenderal	Inspektorat V	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
9	Kebijakan Pengawasan Tahun 2021 - 2024	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
10	Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
11	Peraturan tentang Rencana Pembangunan Kawasan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

12	Informasi tentang lokus prioritas pembangunan desa dan perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
13	Pedoman pemberdayaan perempuan dan anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
14	Pedoman pemberdayaan masyarakat adat	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
15	Informasi tentang status perkembangan desa/IDM	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekeratriat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
16	Kepmen Desa PDTT tentang Pedoman ketahanan pangan di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
17	Kepmen Desa PDTT tentang Panduan penanganan bencana di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
18	Panduan konvergensi penurunan stunting Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
19	Panduan Desa peduli perlindungan sosial	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
20	Panduan Desa peduli kesehatan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
21	Panduan Desa peduli keluarga	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
22	Panduan pelaksanaan monitoring lanjutan ATS & ABPS sebagai dampak pandemi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
23	Panduan perlingsos di Desa terhadap peningkatan peran perempuan dalam pemenuhan hak anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
24	Dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan perdesaan bidang advokasi dan kerja sama	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

25	Panduan Desa ramah perempuan dan peduli anak	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
26	Panduan kepemimpinan inklusif	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
27	Panduan Desa peduli iklim	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
28	Panduan Desa tanggap bencana	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
29	Panduan Desa peduli penghidupan berkelanjutan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
30	Panduan akuntabilitas sosial di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
31	Panduan fasilitasi Desa inklusif	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
32	Panduan ketahanan pangan di Desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
33	Peraturan tentang penetapan BUMDes berbadan hukum	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
34	Peraturan tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
35	Peraturan tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
36	Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
37	Kebijakan terkait pengembangan kelembagaan BUMDes	Direktorat Jenderal Pengembangan	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi	Selama masih	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

		Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	relevan atau ada pembaruan aturan				
38	Peraturan tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
39	Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Terentaskan	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Prgoram Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
40	Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Terentaskan	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Prgoram Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
41	Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah yang memiliki Karakteristik Tertentu	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
42	Data Indeks Komposit Ketertinggalan (IKK) Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Prgoram Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
43	Data Intervensi Program dan Kegiatan PPDT oleh Kementerian/Lembaga di Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Prgoram Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
44	Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
45	Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
46	Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
47	Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Daerah Khusus	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
48	Data Ketersediaan Base Transceiver Station Tower (BTS) dan Akses Internet di Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
49	Data BUMDes di Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
50	Data Kebutuhan Daerah yang memiliki Karakteristik Tertentu	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

51	Data Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT)	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	5 Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
52	Data Dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT)	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
53	Data Potensi Unggulan Kabupaten Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan			√	Sesuai Retensi Arsip
54	Peraturan tentang Tata Cara Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
55	Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (RTSP,RSKP, Renbangmas; Dok.RKT di BPI)	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
56	Data Status Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
57	Data Profil Satuan Permukiman Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
58	Data Penempatan Transmigran	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Fasilitas Penempatan dan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
59	Data Status Satuan Permukiman Bina	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
60	Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
61	Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
62	Data Hasil Evaluasi Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

63	Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	
64	Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tahunan			√	
65	Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat SP & PSKP	Tahunan			√	
66	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Selama masih relevan atau ada pembaruan			√	Sesuai Retensi Arsip
67	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
68	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
69	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
70	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

71	Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
72	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
73	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
74	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
75	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
76	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
77	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

78	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
79	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 148 Tahun 2023 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
80	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Internal Dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Selama masih relevan atau ada pembaruan aturan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
81	Profil Singkat Menteri	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
82	Tugas Dan Fungsi Kementerian	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun				Sesuai Retensi Arsip
83	Sejarah Singkat kementerian	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
84	Berita terkait pelaksanaan tugas kementerian	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
85	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
86	Informasi Kegiatan Kementerian Melalui Buletin Nawala	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Triwulanan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
87	Laporan Harian Update Sosial Media Kementerian	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
88	Rancangan Komunikasi Kelembagaan Kementerian (Blueprint)	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
89	Struktur Organisasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
90	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
91	Profil Singkat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
92	Profil Singkat Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

93	Pengumuman Tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemendesa PDTT Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
94	Pengumuman Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemendesa PDTT Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
95	Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kemendesa PDTT Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
96	Informasi terkait administrasi Kepegawaian yang terdiri dari kenaikan pangkat, cuti, pension, Kartu istri/Suami, asuransi kesehatan, pension janda/duda, pengembalian tabungan perumahan, izin melanjutkan pendidikan di luar jam kerja, tugas belajar, beasiswa, kartu pegawai, taspen, uang pindah, kenaikan gaji berkala, izin luar negeri.	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
97	Statistik PNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipekerjakan/diperbantukan pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang lain.	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
98	Pegawai Penerima penghargaan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
99	Daftar Penerima SLKS (Penghargaan) Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
100	Informasi tentang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
101	Informasi tentang pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
102	Informasi tentang rencana tindak SPIP	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
103	Informasi tentang Bisnis Proses di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
104	Informasi tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
105	Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

106	Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2022 KDPDTT yang telah di audit oleh BPK	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
107	Informasi rincian Opini atas LKKL dan LKBUN dari BPK RI	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
108	PK dan PI Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
109	Laporan Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Tahunan			√	Sesuai Retensi Arsip
110	Rencana Strategis Kementerian 2020-2024	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Sepanjang Tahun	√		√	Sesuai Retensi Arsip
111	Rencana Kerja Kementerian Tahun 2020	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
112	Rencana Kerja Kementerian Tahun 2021	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
113	Rencana Kerja Kementerian Tahun 2022	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Tahunan	√		√	Sesuai Retensi Arsip
114	Rencana Umum Pengadaan	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip
115	Paket Pengadaan (Tender/Seleksi/Tender Cepat/Penunjukan Langsung) di LPSE	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Sepanjang Tahun			√	Sesuai Retensi Arsip